

INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA DI ASEAN: SUATU TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK

(Internationalization of Indonesian in ASEAN: A Sociolinguistic Review)

Muhammad Alfian Tuflih*, Mayong, Ainun Jariah, Arjun S

Universitas Negeri Makassar,

Jl. Mallengkeri Raya, Parangtambung, Makassar.

Pos-el: alfian.tuflih@unm.ac.id

Naskah Diterima 12 Januari 2024; Direvisi Akhir 21 Mei 2025;

Disetujui 9 Desember 2025

DOI: <https://doi.org/10.26499/sawer.v31i2.1611>

Abstract

This research aims to describe the feasibility of Indonesian as the official language of ASEAN and explain the supporting factors. This type of research is classified as qualitative research. The approach used is a sociolinguistic approach. The data sources in this research are books or manuscripts related to Indonesian as the official language of ASEAN. The data collection techniques used are note-taking techniques, participatory observation techniques, and documentation techniques. The results of this research show that Indonesian has the potential to become the official language of ASEAN. The factors that support Indonesian becoming an ASEAN language are (1) history of the Indonesian language, (2) Indonesian language regulations, (3) ASEAN language regulations, (4) Indonesian for Foreign Speakers (BIPA), and (5) attitudes and language politics. These five factors work together so that Indonesian deserves to be the official language of ASEAN.

Keywords: Indonesian, official language, ASEAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN dan memaparkan faktor-faktor pendukungnya. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiolinguistik. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah buku atau naskah-naskah yang berhubungan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik catat, teknik observasi partisipatif, dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN. Faktor-faktor yang menjadi pendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN yakni (1) sejarah bahasa Indonesia, (2) regulasi bahasa Indonesia, (3) regulasi bahasa ASEAN, (4) Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), dan (5) sikap dan politik bahasa. Kelima faktor tersebut saling bersinergi sehingga bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi ASEAN.

Kata-kata Kunci: bahasa Indonesia, bahasa resmi, ASEAN

PENDAHULUAN

Dalam berinteraksi manusia membutuhkan bahasa sebagai media untuk saling berkomunikasi. Menurut Yasin (1991) peran suatu bahasa ditentukan oleh fungsi komunikasinya. Fungsi komunikasi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia

merupakan media komunikasi resmi kenegaraan yang berfungsi pula sebagai alat persatuan. Jika menelisik sejarahnya, bahasa Indonesia memiliki ikatan yang erat dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk rumpun Austronesia. Bahasa ini telah digunakan

sebagai *lingua franca* di nusantara meskipun belum dalam bentuk formalnya.

Ada dua jenis bahasa melayu berdasarkan penggunaannya. Bentuk bahasa sehari-hari disebut dengan istilah Melayu Pasar. Jenis bahasa ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif. Kekurangan dari bahasa Melayu Pasar adalah mudahnya ditemukan kesalahan karena banyaknya penyerapan istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan penggunaannya. Bentuk kedua disebut sebagai Melayu Tinggi. Pada masa lalu bahasa Melayu tinggi digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu Pasar (Alek & Achmad, 2010).

Sejarah tersebut kemudian menjadikan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Awal pendeklarasian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi bermula pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian dikenang sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tanggal tersebut, diresmikanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Sejak saat itu, resmilah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Bahasa yang setelah kemerdekaan melalui UUD 1945 dijadikan bahasa resmi negara. Bahasa yang akan menjadi alat komunikasi dan pemersatu suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.

Pasca kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Tercatat dilakukan dua kali perubahan ejaan pasca kemerdekaan. Ejaan Soewandi atau biasa disebut pula Ejaan Republik digunakan pada tahun 1949. Setelah itu, pada tahun 1972 dilanjutkan dengan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Secara keseluruhan, ada tiga jenis ejaan yang pernah dipakai di Indonesia. Satu ejaan sebelum kemerdekaan yang disebut dengan nama Ejaan Van Ophuisjen, tepatnya pada tahun 1901 (Anshari, 2011).

Perkembangan bahasa juga berefek domino terhadap Indonesia dengan hubungan

negara-negara di sekitarnya. Pada tahun 1967, negara-negara di kawasan Asia Tenggara bergabung membentuk perkumpulan yang diberi nama Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan nama *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN). Proses pembentukan dimulai oleh konferensi Bangkok oleh lima negara yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Hingga tahun 2016 anggota negara ASEAN berjumlah sepuluh negara. Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja, berturut-turut merupakan negara keenam hingga kesepuluh yang terdaftar sebagai anggota ASEAN. Timor Leste yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia, hingga tahun 2016 belum menjadi anggota ASEAN.

Sebagai sebuah kesatuan, ASEAN juga menggunakan bahasa sebagai media komunikasinya. Namun, hingga tahun 2016, ASEAN belum menetapkan sebuah bahasa resmi komunikasi. Berbeda dengan Indonesia yang sejak awal telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya, para anggota negara-negara ASEAN hingga saat ini masih menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Hal ini tentunya kurang sejalan dengan prinsip dasar ASEAN yang ingin menyatukan rasa antara negara-negara di Asia Tenggara.

Penggunaan bahasa Inggris kurang tepat, karena Inggris bukan bagian dari ASEAN. Selain itu penggunaan bahasa Inggris juga dapat berdampak negatif bila tidak dilakukan pembatasan atau pembuatan regulasi kebahasaan. Jika tidak ada regulasi, maka penduduk negara akan mencampuradukkan antara bahasa Inggris dan bahasa asli negaranya dalam komunikasi sehari-hari. Di Indonesia, sepuluh tahun setelah Sumpah Pemuda, melalui komite nasional telah dibuat regulasi mengenai penyerapan bahasa asing (Munsiy, 2005). Pembuatan regulasi ini bukan berarti bahasa Inggris tidak akan digunakan, namun dilakukan pembatasan. Penggunaan bahasa Inggris dibatasi sebagai alat, bukan tujuan (Zulkarnain, 2012).

Wacana penetapan bahasa resmi ASEAN mulai berhembus pada tahun 2000-an. Meskipun bahasa Inggris masih digunakan sebagai bahasa komunikasi negara ASEAN, namun bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu menjadi dua bahasa yang dipertimbangkan menjadi bahasa resmi ASEAN. Kedua bahasa ini dianggap mampu menjadi media komunikasi para negara ASEAN. Jika dilihat dari segi penggunaannya, bahasa Indonesia lebih unggul dibandingkan bahasa Melayu. Selain di kawasan Asia Tenggara, di beberapa negara maju seperti Australia dan Belanda, bahasa Indonesia telah masuk dalam kurikulum pendidikan. Namun, jika dilihat dari sisi sejarah, tentu bahasa Melayu lebih unggul, karena bahasa Indonesia itu sendiri merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu.

Ada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahasa resmi ASEAN. Dua contoh yang telah disebutkan sebelumnya belum cukup untuk dijadikan alasan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Penelitian ini akan mengemukakan faktor-faktor yang mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Sosiolinguistik merupakan pisau bedah atau teori yang akan digunakan untuk melakukan telaah.

Penelitian relevan tertuang dalam artikel Musgrave (2014) yang menyajikan analisis kontemporer tentang bagaimana bahasa Indonesia menggantikan peran bahasa-bahasa lokal dalam konteks urban dan ekologi linguistik. Begitu juga dengan penelitian Sneddon (2003) yang meneliti secara historis perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, serta transformasinya dalam struktur sosial dan politik modern. Kemudian yang menjadi kebaruan penelitian ini adalah internasionalisasi Bahasa Indonesia menjadi *Lingua Franca* di ASEAN sebagai bahasa pemersatu melalui faktor pendukung dengan mengaitkan beragam unsur sejarah, penggunaan, penutur, dan kemudahan dalam berbagai bidang.

KERANGKA TEORI

Sosiolinguistik bersasal dari kata “sosio” dan “linguistik”. Sosio sama dengan kata sosial yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa khususnya unsur-unsur bahasa. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Berdasarkan pengertian sebelumnya, sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek aspek kemasyarakatan bahasa khususnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (Nababan, 1993).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat (Chaer & Agustina, 2004). Hudson (1996) menyatakan bahwa sosiolinguistik mencakupi bidang kajian yang sangat luas, tidak hanya menyangkut wujud formal bahasa dan variasinya, tetapi juga penggunaan bahasa di masyarakat. Penggunaan bahasa tersebut mencakupi faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan, misalnya faktor hubungan antara penutur dan mitra tutur.

Di dalam ilmu linguistik, bahasa tidak hanya dipahami sebagai tanda saja tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian yang berdasarkan sosiolinguistik akan merancang perhitungan perencanaan bahasa di dalam masyarakat. Menurut Heugen perencanaan bahasa adalah segala usaha yang dilakukan oleh lembaga tertentu untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan bahasa atau melibatkan usaha pembinaan, pengaturan, serta pembakuan atas bahasa sasaran (Muslich & Oka, 2012).

Fishman (1972) mengatakan bahwa perencanaan bahasa akan berhasil apabila didukung oleh semua pihak, khususnya pemerintah atau menteri terkait, pendidik, ahli bahasa, hakim, kalangan swasta, dan

rakyat itu sendiri. Sementara dalam bukunya *Advance in Language Planning*, Fishman (1974) menekankan bahwa perencanaan bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perencanaan status dan perencanaan korpus. Perencanaan status adalah pemberian kedudukan yang jelas kepada suatu bahasa, yaitu sebagai bahasa resmi, bahasa negara, atau bahasa nasional. Tindakan ini menyangkut peran pemerintah, payung hukum, serta pelaksanaan teknisnya yang terkait dengan pemakaian, penguasaan penyebaran dasar pemakaian, pemupukan sikap pemakai, dan deskripsi bahasa tersebut. Perencanaan korpus adalah usaha kodifikasi bahasa dalam rangka penyempurnaan bahasa tersebut sehingga bisa dipakai secara mantap baik secara lisan maupun tulis. Aspek-aspek yang dirancang adalah abjad, ejaan, lisan, tulis, kosakata, istilah, kamus, buku teks, laras, sastra, dan bahan pengajaran bahasa di lembaga-lembaga pendidikan.

Perencanaan bahasa melingkupi seluruh kebahasaan, termasuk bahasa Indonesia yang dicanangkan sebagai *Lingua Franca* ASEAN. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa yang telah lama digunakan sebagai *lingua franca* di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Perkembangan bahasa Melayu terus berlanjut dan mencapai puncaknya sebagai bahasa perantara antarsuku dan pedagang di wilayah maritim Nusantara. Karena sifatnya yang relatif sederhana dalam tata bahasa serta kosakata yang mudah diterima oleh berbagai etnis, bahasa Melayu menjadi bahasa yang inklusif dan mudah menyebar. Pengaruh ini kemudian berlanjut hingga masa kolonial, dengan bahasa Melayu digunakan oleh Belanda dalam pendidikan dan administrasi di Hindia Belanda (Sneddon, 2003).

Bahasa Indonesia secara resmi diangkat dari bahasa Melayu pada Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda mencantumkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Peristiwa ini menandai peralihan status bahasa Melayu menjadi simbol identitas

nasional dan alat perjuangan kemerdekaan (Alwi et al., 2000). Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia terus dikembangkan dan dibakukan melalui lembaga-lembaga kebahasaan seperti Pusat Bahasa dan kini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bahasa Indonesia tumbuh sebagai bahasa resmi negara, bahasa pendidikan, hukum, media, dan sastra yang hidup dan berkembang dinamis.

METODE

Jenis penelitian pada hakikatnya merupakan strata yang mengatur ruang atau teknik penelitian agar memperoleh data maupun kesimpulan penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu rancangan penelitian yang memaparkan fenomena secara menggambarkan alamiah objek atau penelitian berdasarkan pada fakta yang ada.

Dalam pelaksanaannya, hasil analisis data dapat disajikan deskriptif. Pendapat ini kemudian dijelaskan oleh Siswantoro (2011) yang memaparkan bahwa ciri utama paparan deskriptif adalah analisis yang dikerjakan berdasarkan tiap-tiap unsur yang sejenis. Sumber data diperoleh melalui proses membaca yang intens, serta wawancara untuk memperkuat dan menambah data. Hal ini kemudian akan mempertajam analisis data (Tarigan, 2010). Oleh karena itu, fokus penelitian ini digunakan untuk mengkaji potensi internasionalisasi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN dan faktor-faktor yang dapat menjadi acuan internasionalisasi bahasa menjadi bahasa resmi ASEAN.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan satu-persatu bagian yang akan dianalisis. Dimulai dengan penyajian hasil analisis data kelayakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Kemudian dilanjutkan dengan faktor-faktor penguatnya yang terdiri

dari sejarah bahasa Indonesia, hingga sikap dan politik bahasa. Untuk lebih jelasnya, berikut ini pemaparannya:

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi ASEAN

Fokus pada bagian ini adalah memaparkan kelayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan dalam komunikasi internasional. Setakat ini, telah banyak berhembus isu peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Isu ini timbul karena keresahan dan kejenuhan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Inggris sebagai *lingua franca* di ASEAN mampu mengurangi rasa nasionalisme Negara negara ASEAN.

Data (1)

Kohn secara eksplisit menunjukkan bahwa bahasa bagi bangsa pemiliknya merupakan faktor budaya (bahkan juga faktor politik) yang selalu dipertimbangkannya secara sadar ataupun tidak.”
(Muslich & Oka, 2012)

Berdasarkan Data (1), dapat disimpulkan bahwa selain fungsi komunikasi, bahasa juga berperan sebagai media politik. Jadi, dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa ASEAN seperti pada saat ini, politisasi di kawasan Asia Tenggara akan dimonopoli oleh Inggris. Negara-negara ASEAN akan sangat bergantung dengan Inggris. Padahal, negara-negara ASEAN punya potensinya masing-masing untuk berkembang tanpa ketergantungan dengan negara Eropa.

Agar terlepas dari ketergantungan itu, sudah waktunya ASEAN sebagai wadah berkumpulnya Negara-negara di Asia Tenggara untuk memilih sebuah bahasa selain bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatunya. Penelitian ini mencoba memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Bahasa Indonesia dianggap memiliki potensi besar untuk menyatukan bahasa negara ASEAN. Asumsi ini berdasarkan fungsi nyata bahasa Indonesia yang telah menjadi pemersatu kurang lebih tujuh ratus bahasa daerah di Indonesia, sesuai dengan data Sneddon.

Data (2)

“Secara konstitusional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009, Bab III, Bagian Keempat menjadi landasan kuat dan legal dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh lembaga kebahasaan, dan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.”
(Muslich & Oka, 2012)

Berdasarkan Data (2) politik bahasa yang dilakukan pemerintah dengan membuat regulasi/aturan mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia tentu merupakan rencana baik. Melalui politik bahasa ini, diharapkan penduduk Indonesia mampu memberikan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Jika sikap dan politik bahasa telah sejalan, maka bukan hal yang mustahil, jumlah sekitar 50% penduduk yang belum mampu berbahasa Indonesia, mampu menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi ASEAN.

Faktor-faktor Penunjang Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi ASEAN

Setelah mengetahui bahwa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi ASEAN dari sisi regulasi (hukum), langkah selanjutnya adalah memaparkan faktor-faktor yang menguatkan potensi tersebut. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada delapan faktor yang akan dijadikan pijakan untuk menguatkan potensi bahasa Indonesia. Faktor yang dimaksud dimulai dengan memaparkan data mengenai sejarah bahasa Indonesia, hingga penjelasan mengenai politik bahasa.

Sejarah Bahasa Indonesia

Segala sesuatu yang pernah terjadi pada masa lalu akan menjadi sebuah sejarah pada masa yang akan datang. Begitu pun dengan bahasa Indonesia. Bahasa yang telah diplot menjadi bahasa negara Indonesia ini juga memiliki sejarahnya. Jika berbicara mengenai sejarah bahasa Indonesia, maka tidak dapat dilepaskan dengan sejarah bangsa Indonesia. Bangsa yang secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya pada

tanggal 17 Agustus 1945 ini memiliki sejarah yang cukup panjang.

Data (3)

“Sriwijaya mula-mula menaklukkan Bangka kemudian Kerajaan Melayu di Jambi untuk mengambil alih peran sebagai penguasa lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka Dimulai dari abad ke-7 sampai 12, wilayah kekuasaan Sriwijaya telah membentang dari Sumatera sampai ke Asia Tenggara.” (Muljana, 1981)

Berdasarkan data (3), sejarah kekuasaan Sriwijaya kemudian akan dijadikan sebagai patokan perkembangan bahasa Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran Kerajaan Sriwijaya yang dalam penaklukkan daerah kekuasaannya, juga melakukan persebaran bahasa dan budaya. Kemudian diperkuat oleh penemuan beberapa batu bertulis (inskripsi) yang merupakan bukti sejarah keberadaan bahasa Melayu di Kepulauan Nusantara. Prasasti-prasasti tersebut menjadi bukti kalau bahasa Melayu mulai digunakan pada masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti itu memuat tulisan Melayu Kuno yang bahasanya merupakan campuran antara bahasa Melayu Kuno dan bahasa Sanskerta. Nama-nama prasasti tersebut dikemukakan oleh Muslich (2012) sebagai berikut.

Data (4)

Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Tatang di Sumatera Sedlatan, yang bertahun 683 Masehi atau 605 Saka ini dianggap prasasti yang paling tua, yang memuat nama Sriwijaya. Prasasti Talang Tiwo, bertahun 684 Masehi atau 606 Saka, menjelaskan tentang konstruksi bangunan Taman Srikestra yang dibangun atas perintah Hyang Sri-Jayanaca sebagai lambang keselamatan raja dan kemakmuran negeri. Prasasti Kota Kapur di Pulau Bangsa dan prasasti Karang Brahi di Kambi, keduanya bertahun 686 Masehi atau 608 Saka, isinya hampir sama, permohonan kepada yaitu Yang Maha Kuasa untuk keselamatan kerajaan Sriwijaya, agar menghukum para penghianat dan orang-orang yang memberontak kedaulatan raja. Prasasti lainnya seperti Karang Brahi (686 Masehi), Gandasuli (832 Masehi), Bogor Masehi, (942 dan Pagaruyung (1356) (Abas, 1987: 24).”

Berdasarkan data (4) tentang berbagai prasasti yang terdapat pada zaman Sriwijaya, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, bahasa Melayu Kuno telah berperan sebagai

lingua franca. Bahkan, jika coba ditelaah, ada kemungkinan pada masa itu bahasa Melayu merupakan bahasa resmi pada zaman Sriwijaya. Hal tersebut dapat disimpulkan karena pada zaman itu, bahasa Melayu telah memegang peranan penting dalam dunia politik dan keagamaan Kerajaan Sriwijaya seperti yang tertulis pada beberapa prasasti.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, jika sejarah Sriwijaya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan bahasa Melayu. Bahasa yang kemudian menjadi alat pemersatu suku-suku di Indonesia setelah peristiwa Pemuda pada tahun 1928.

a. Perkembangan bahasa Melayu sebelum Traktat London

Perkembangan bahasa disistematisasikan Melayu pada Gambar (1) sangat berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pasca Traktat London 1824, bahasa Melayu berkembang menjadi empat arah, yaitu: (a) di Indonesia menjadi Bahasa Indonesia; (b) di Malaysia menjadi Bahasa Malaysia; (c) di Brunei menjadi Bahasa Melayu Baku; dan (d) di Singapura menjadi Bahasa Nasional. Keempat negara inilah yang berperan erat meningkatkan potensi bahasa Melayu menjadi bahasa dunia seperti yang dikemukakan oleh Collins dalam bukunya *Bahasa Melayu Bahasa Dunia*.

b. Era Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 sampai ke-11 Masehi)

Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya mengalami masa kejayaan relatif cepat karena lokasinya yang sangat strategis pada Selat Malaka. Daerah yang menjadi pusat perdagangan selama berabad-abad lamanya. Para saudagar dari timur dan barat serta dari Kepulauan Nusantara bertemu dan mengadakan transaksi dagang di sekitaran Selat Malaka. Bahasa Melayu atau semacam bahasa Melayu Kuno kemudian menjadi bahasa para saudagar. Sehingga, pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu menjadi bahasa resmi. Hal ini membuat perkembangan bahasa Melayu menjadi begitu pesat seperti pada kutipan berikut.

Data (5)

"Penyebarluasan bahasa Melayu terjadi karena bahasa Melayu merupakan bahasa resmi kerajaan Sriwijaya. Jadi, masyarakat di luar kerajaan perlu mempelajari bahasa Melayu untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan kerajaan Sriwijaya. Dalam konteks ini, pengaruh kejayaan kerajaan berkontribusi besar bagi pengembangan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua karena bangsa lain ("siapa pun") yang berkepentingan berkomunikasi dengan kerajaan harus menguasai Sriwijaya bahasa Melayu." (Indihadi, 2015)

Peresmian bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaan menyebabkan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kerajaan harus menggunakan bahasa Melayu. Kebijakan inilah yang membuat bahasa Melayu semakin berkembang. Seharusnya, kebijakan ini dilakukan pula oleh pemerintah Indonesia saat ini agar bahasa Indonesia bisa berkembang sepesat bahasa Melayu.

Dengan demikian, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat kegiatan hajat manusia dan pusat administrasi kerajaan dan daerah-daerah taklukannya. Sriwijaya juga merupakan pusat kebudayaan, pendidikan, dan keagamaan.

c. Era Kerajaan-kerajaan Melayu (abar ke 12 sampai ke-19 Masehi)

Pemakaian bahasa Melayu yang dipengaruhi bahasa Sanskerta telah mendominasi Kerajaan Sriwijaya. Hal ini jelas terlihat pada berbagai inskripsi batu bertulis yang ditemukan pada berbagai tempat di Sumatra. Tetapi, dalam era berikutnya, yaitu era Kerajaan-kerajaan Melayu yang muncul dari abad ke-12 sampai ke-19 Masehi, bahasa yang dipakai tidak lagi dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Raja-raja yang berkuasa pada saat itu berketurunan Melayu. Pada abad ke-16 bahasa Melayu mulai memperkukuh perannya, bukan hanya dalam dunia pendidikan, tapi juga merambat hingga ke bidang kebudayaan dan perhubungan di Nusantara. Kutipan berikut dari tulisan Mahayana dapat menjadi pijakannya.

Data (6)

Menjelang akhir abad ke-16, Jan Huygen van Linschoten selepas kunjungannya ke wilayah Nusantara, menyatakan bahwa bahasa Melayu telah sedemikian masyhurnya di kawasan ini. Lebih

daripada itu, bahasa Melayu telah dianggap sebagai bahasa yang se hormat-hormatnya dan sebaik-baiknya dari segala bahasa di Timur. Dalam Itinerario (1596), Linschoten menyatakan bahwa "yang tidak berbahasa Melayu di Hindia Belanda, dia tidak bisa turut serta seperti bahasa Perancis untuk kita." Selanjutnya, dikatakan bahwa pada tahun 1596, bahasa Melayu merupakan bahasa hasil ramuan, tetapi pada akhir abad ke-16, bahasa ini telah demikian maju sehingga menjadi bahasa budaya dan perhubungan. Oleh karena itu, seperti dikutip A. Teeuw, "Setiap orang yang ingin ikut serta dalam kehidupan antarbangsa di kawasan itu mutlak perlu mengetahui bahasa Melayu." (Mahayana, 2009)

Satu abad kemudian, tepatnya pada akhir abad ke-17, bahasa Melayu bahkan telah memiliki fungsi yang dapat disejajarkan dengan fungsi bahasa Perancis di Eropa, atau semacam bahasa perantara di Italia atau di Levent. Persebaran yang telah meluas ini bertahan meskipun Kerajaan Sriwijaya telah tumbang. Kerajaan-kerajaan kecil yang dulu merupakan jajahan kerajaan Sriwijaya kemudian memerdekakan diri. Namun, meskipun mereka telah memerdekakan diri, kerajaan ini tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasinya.

Sistematika perjalanan bahasa Indonesia berdasarkan data (6) dapat dilihat pada gambar (1) berikut.



Gambar 1. Alur Perpindahan Bahasa Melayu

Segara setelah Kerajaan Bintan didirikan di Pulau Bintan keadaan memaksa raja memindahkan ibu kota kerajaannya ke Pulau Tumasik, letak Singapura sekarang. Beberapa tahun kemudian, Tumasik dikuasai oleh Kerajaan Majapahit dari Jawa. Ibu kota, sekali lagi, harus dipindahkan lagi ke Malaka di Semenanjung Malaya. Daerah-daerah tempat perpindahan ini masih termasuk daerah Riau. Bahasa Melayu digunakan di daerah itu sebagai bahasa ibu.

d. Perkembangan Bahasa Melayu Setelah Traktat London

Sesudah Traktat London ditandatangani antara pemerintah Inggris dan Belanda, pemisahan antara Bahasa Melayu versi Riau dan Johor semakin nyata. Bahasa Melayu versi Johor di Semenanjung Malaya dan Singapura berkembang, tetapi tidak sepesat perkembangan versi bahasa Melayu Riau di Kepulauan Nusantara.

Bahasa Melayu Riau mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat pribumi yang bersifat multi-etnik yang mempunyai bahasa daerah sendiri-sendiri. Di samping itu, pemerintah Belanda dengan segala kebijakannya membuat bahasa Melayu Riau menjadi bahasa kedua setelah bahasa Belanda dalam fungsi komunikasinya. Pertanyaannya kemudian, mengapa bukan bahasa Melayu Riau yang dijadikan sebagai bahasa utama dan bahasa Belanda sebagai bahasa kedua, padahal bahasa Melayu pada saat itu telah menjadi *Lingua Franca*? Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Raden Ajeng Kartini:

Data (7)

"Bila saya menguasai bahasa Belanda, masa depan saya terjamin. Lapangan kerja terbuka dan saya seolah-olah anak manusia yang bebas. Sebab saya sebagai anak Jawa tahu seluk beluk pribumi. Banyak yang hingga saat ini masih gelap dan menjadi teka teki bagi orang Eropa, dapat saya pecahkan hanya dengan beberapa patah kata (Groeneboer, 1999)."

Data (7) mengungkapkan betapa bahasa Belanda pada masa itu dianggap sangat penting oleh orang-orang Indonesia. Namun, yang tidak disadari adalah, Belanda juga menggunakan bahasa sebagai media politik pada masa itu. Hal ini dilakukan untuk melebarkan ketergantungan terhadap Belanda seperti pada kutipan berikut:

Data (8)

perubahan politik di negeri Belanda berpengaruh pula terhadap kebijaksanaan Belanda di tanah jajahan. Di balik misi memberi kesejahteraan bagi penduduk pribumi di Hindia Belanda, tersimpan politik kebudayaan (politik bahasa) untuk "membelandakan" pola pikir dan perilaku bangsa terjajah. Oleh karena itu, mulailah politik itu dijalankan dengan kembali menekankan pemberian mata pelajaran bahasa Belanda di semua tingkat persekolahan. Bahasa Belanda yang semula

diajarkan di sekolah-sekolah gubernemen, kini dicobakan pula di sekolah pribumi ditingkat yang lebih rendah. Dalam kaitannya dengan usaha "pembelandaan" itu, Belanda melakukan apa yang disebut pendekatan asimilasi atau adaptasi. "Kekuasaan kolonial harus berusaha sekeras mungkin untuk menyamakan penduduk asli, jadi juga harus memberikan perlakuan yang sama seperti yang ada di negara induk. "barat" harus Peradaban menerobos masuk ke penduduk yang bukan Eropa." (Mahayana, 2009)

Politik bahasa yang dijalankan oleh Belanda tidak bertahan lama. Pengaruh banyaknya jumlah pengguna bahasa Melayu Riau menjadi alasannya. Secara bertahap, bahasa Melayu Riau berubah dari *lingua franca*, bahasa pemersatu, bahasa resmi, dan akhirnya menjadi bahasa negara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sampai saat ini bahasa Melayu, baik yang sekarang menjadi bahasa Indonesia di Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia, Brunei, dan Singapura, tetap berkembang dan menjalankan fungsinya sebagai alat komunikasi secara efektif. Bahkan, secara *de facto* telah berperan sebagai bahasa komunikasi luas di Asia Tenggara. Hal yang penting untuk dilakukan saat ini adalah pengakuan dari dunia internasional (lewat ASEAN) bahwa bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang layak dipakai sebagai bahasa komunikasi internasional atau dunia. Pertanyaannya kemudian, di antara keempat negara ini, perlu dipilih Melayu manakah yang akan dijadikan acuan. Namun jika menelisik sejarah, Melayu Riau yang kini telah resmi berubah nama menjadi Bahasa Indonesia memiliki potensi yang paling besar. Alasan pemilihan ini karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling tinggi kadar melayunya.

Regulasi Bahasa Indonesia

Setakat ini, bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Sejak ditetapkan menjadi bahasa pemersatu melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia terhitung telah menyatukan tujuh ratus bahasa daerah yang dimiliki tiap suku di Indonesia. Sebuah pencapaian luar biasa yang tentu tidak semua bahasa mampu melakukannya. Namun,

semua ini tentu tidak lepas dari peran berbagai pihak seperti: (a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang menetapkan kebijakan mengenai aturan kebahasaan; (b) badan bahasa sebagai penggerak dan pengontrol yang menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah; (c) ahli bahasa yang senantiasa melakukan pembaharuan guna terbentuknya bahasa yang dapat digunakan oleh semua kalangan; serta (d) masyarakat sebagai pengguna dan motor utama penggerak perkembangan kebahasaan.

Keempat pihak itulah yang dengan perannya masing-masing mampu mengangkat bahasa Indonesia hingga saat ini menjadi bahasa yang berpotensi menjadi bahasa internasional. Fokus pada pembahasan bagian ini adalah mengenai regulasi bahasa atau aturan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembahasan akan diperkecil dengan mengkaji dua regulasi bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu: (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. Kedua regulasi bahasa ini dianggap memiliki landasan hukum yang paling kuat guna peningkatan dan pengembangan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sejalan dengan penulisan karya tulis ilmiah ini yang mencoba memberikan bukti potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN.

Penggunaan bahasa Indonesia jika merujuk pada aturan, sebenarnya harus digunakan pada situasi formal dan bersifat menyeluruh. Dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, pada bagian awal dijelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

Data (9)

*"Bahasa negara adalah bahasa Indonesia."
(Pasal 36, UUD 1945)*

Pasal 36 dalam UUD 1945 membahas mengenai kewajiban menggunakan bahasa

Indonesia. Ada beberapa situasi yang mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Situasi yang dimaksud tertuang dalam tiga belas pasal. Dimulai dari Pasal 26—39 seperti yang dirumuskan dalam tabel (1) berikut.

Tabel 1. Situasi Wajib Pengguna Bahasa Indonesia

Pasal	Situasi
Pasal 26	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 27	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.
Pasal 28	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.
Pasal 29	Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
Pasal 30	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.
Pasal 31	(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia; (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
Pasal 32	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.
Pasal 33	(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; (2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.
Pasal 34	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.
Pasal 35	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.
Pasal 36	(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia; (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi; (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia; (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.
Pasal 37	(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia; (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.
Pasal 38	(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum,

	spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.
Pasal 39	(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa; (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus.

Pentingnya masalah aturan kebahasaan mendorong pemerintah untuk membuat sebuah lembaga yang mengurus mengenai bahasa. Lembaga yang diberi nama “Lembaga Kebahasaan” ini memiliki landasan hukum yang kuat. Pada Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2009, menyatakan bahwa Lembaga Kebahasaan dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri. Landasan hukum yang dimiliki oleh Lembaga Kebahasaan, digunakan untuk menjalankan fungsinya sebagai pengembang, pembina, dan pelindung bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

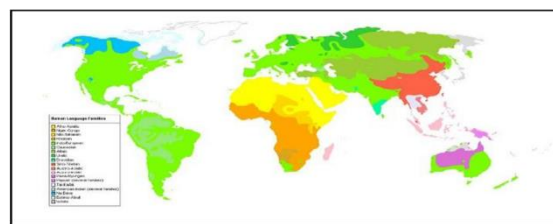
Sejarah persebaran rumpun bahasa di dunia ini menjadi salah satu pertimbangan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional. Pada bagian sebelumnya tentang “Sejarah Bahasa Indonesia” telah dijelaskan panjang lebar mengenai perjalanan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bagian ini akan membahas sedikit mengenai regulasi bahasa ASEAN. Namun sebelum itu, akan dikaitkan terlebih dahulu dengan sejarah bahasa Melayu.

Jika menelisik sejarah, bahasa Melayu merupakan bahasa yang berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Salah satu rumpun bahasa terbesar yang berada di Asia Tenggara.

Data (10)

Rumpun bahasa Austronesia merupakan salah satu rumpun bahasa terbesar yang digunakan lebih dari separuh belahan dunia, membentang dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah Timur, serta membujur dari Taiwan hingga Hawaii di utara, hingga Selandia Baru di selatan. Luas persebarannya menjadikan bahasa Austronesia menjadi bahasa terbesar sebelum kolonialisme. Turunan bahasa Austronesia beranggotakan sekitar 1200 bahasa yang berkerabat, serta digunakan oleh lebih dari 350 juta orang. (Martins, 2000)

Berdasarkan data (10), luasnya daerah persebaran rumpun Austronesia menjadi penyebab banyaknya pengguna bahasa ini. Berdasarkan letak geografisnya, rumpun bahasa Austronesia berpusat di kawasan Asia Tenggara. Selain Austronesia, rumpun bahasa lain yang terdapat di Asia Tenggara yaitu, Austroasiatik, Hmong Mien, Tai-Kadai, dan Sino-Tibetan. Kelompok bahasa itu tersebar di seluruh wilayah-wilayah di antara kelima Asia Tenggara. Rumpun Austronesia merupakan rumpun bahasa yang terbesar. Bukan hanya di Asia Tenggara, menurut Enthologue.com sebagai salah lembaga peneliti bahasa di dunia, Austronesia menduduki urutan kedua terbesar di dunia dengan 1.262 bahasa. Berikut ini pembagian rumpun bahasa berdasarkan letak geografisnya:



Gambar 2. Persebaran Rumpun Bahasa di Dunia

Jika melihat daerah persebaran dan penggunaannya, kelompok bahasa Austronesia merupakan kelompok bahasa terbesar di Asia Tenggara. Kelompok bahasa, yang daerah tuturannya, berawal dari Pulau Taiwan lalu ke Kepulauan Filipina, Kepulauan Indonesia, Pulau-pulau di Pasifik, hingga Madagaskar di Afrika, ini dituturkan oleh puluhan juta orang. Kebanyakan berkisar di Kepulauan Indonesia dan Filipina. Di dua kepulauan itu, bahasa-bahasa Austronesia, ada yang berstatus bahasa nasional, ada juga yang berstatus bahasa Indonesia/Melayu daerah. Bahasa ini menjadi bahasa-bahasa resmi dan nasional di Indonesia (bahasa Indonesia), Malaysia, Brunei, Singapura.

Regulasi Bahasa (ASEAN)

Sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbanyak, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan. Penajakan perkembangan ini tentu tidak lepas dari

sejarah panjang bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi awal tonggak sejarah dimulainya bahasa Indonesia. Selepas dari peristiwa tersebut, bahasa Indonesia kemudian berturut-turut mendapat tempat di hati rakyat Indonesia. Pasal 36 UUD 1945 menjadi bukti seriusnya pemerintah terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai komunikasi resmi negara.

Hingga saat ini, perkembangan bahasa Indonesia telah mengantarkan bahasa tercinta ini sebagai lambang jati diri bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Fungsi lain dari bahasa Indonesia adalah mempunyai bahasa ini menjadi sarana komunikasi yang modern dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni.

Perkembangan yang telah dicapai bahasa Indonesia juga berefek pada perkembangan Negara. Dipilihnya Jakarta sebagai sekretariat ASEAN merupakan sebuah tanda bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang penting dan punya kekuatan di lingkungan Asia Tenggara. Meningkatnya peran Indonesia dalam pergaulan antarbangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Hal itu juga ditunjang oleh posisi Indonesia dalam percaturan dunia yang semakin hari semakin penting, terutama melalui peranannya, baik dalam turut serta menyelesaikan konflik-konflik politik di berbagai kawasan. Fakta semakin meluasnya fungsi bahasa Indonesia pada perpolitikan dunia, menyebabkan banyak orang asing yang tertarik dan berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, keanekaragaman suku dan budaya Indonesia menjadi modal tambahan bagi orang asing sehingga tertarik mempelajari bahasa Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, bahasa Indonesia hingga saat ini telah diajarkan kepada orang asing di berbagai lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa

referensi mencatat, bahwa bahasa Indonesia telah masuk di Eropa sejak abad ke-17. Meskipun, pada saat itu, orang Eropa masih menyebutnya sebagai bahasa Melayu. Data tersebut dikemukakan oleh Anwar (1998) pada kutipan berikut.

Data (11)

"Pengkajian bahasa Melayu yang dilakukan oleh orang Barat juga sudah cukup lama berlangsung. Dalam tahun 1602, ketua perutusan Kerajaan Aceh yang bernama Abdul Hamid berangkat ke negeri Belanda. Di negeri Kincir Angin itu ia dapat menggunakan bahasa Melayu dengan pejabat-pejabat Belanda, baik menggunakan penerjemah maupun adakalanya secara langsung." (Anwar, 1998)

Tentu bukan hal yang mengagetkan jika orang-orang Belanda paham bahkan mampu menjawab dalam bahasa Indonesia. Lamanya Belanda menjajah Indonesia menjadi alasannya. Bahkan, dalam masa penjajahannya, Belanda menjadi salah satu pihak yang berperan dalam mengembangkan bahasa Indonesia melalui kebijakannya menjadikan bahasa Melayu pada saat itu menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Belanda. Seorang sastrawan Nuruddin Ar Raniri yang berasal dari India, bahkan telah mampu menulis dalam bahasa Melayu kitab yang tebalnya lebih dari seribu halaman. Kehebatan Nuruddin ini dikutip dalam tulisan Anwar (1998) berikut.

Data (12)

"Pengkajian bahasa Melayu/Indonesia di luar negeri sudah cukup lama dilakukan. Sewaktu Nuruddin Ar Raniri tiba di Aceh dari India, dia sudah pandai berbicara bahasa Melayu. Ini terbukti karena belum lama tinggal di Aceh, dia sudah menulis kitab yang tebalnya lebih dari seribu halaman, suatu pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang belum mendalami bahasa Melayu." (Anwar, 1998)

Perkembangan yang pesat ini membuat pemerintah mendirikan sebuah badan yang bertugas untuk mengatasi masalah kebahasaan. Badan ini bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sebuah badan formal yang memiliki landasan hukum kuat sesuai amanah pasal 41 Ayat 2, UU Nomor 24 Tahun 2009 berikut.

Data (13)

“Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan ayat (1) secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. (UU Nomor 24 Tahun 2009)

Sebenarnya, pada masa penjajahan, pemerintah Belanda pun telah membuat sebuah badan bahasa. Sebuah badan yang menjadi cikal bakal pendirian badan bahasa pada masa sekarang. Meskipun berbeda jauh dari segi pendiriannya, namun kedua badan bahasa memiliki fungsi yang sama. Fungsi badan bahasa sejak masa lalu hingga saat ini yaitu menjadi perencana dan pengembang bahasa Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Bahasa, hingga kini, pengajaran bahasa Indonesia telah tersebar ke 36 negara seperti pada kutipan berikut.

Data (14)

“Di dalam negeri saat ini tercatat tidak kurang dari 45 lembaga yang telah mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), baik di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga kursus. Sementara itu, di luar negeri, Pengajaran BIPA dilakukan oleh sekitar telah 36 negara di dunia dengan jumlah lembaga tidak kurang dari 130 buah, yang terdiri atas perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga-lembaga kursus.” (Pusat Bahasa, 2016)

Pendirian APBIPA oleh Pusat Bahasa merupakan sebuah perencanaan yang matang untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pada Kongres Bahasa VI yang dilaksanakan pada tahun 1998, beberapa pakar bahasa dari Australia, Jerman, dan Korea, menjelaskan mengenai fenomena perkembangan bahasa Indonesia di negaranya masing-masing. Sneddon dari Universitas Griffith, Australia bahkan mengatakan bahwa Australia merupakan salah satu pengguna bahasa Indonesia. Di Australia, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa asing yang diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan. Bahkan, pemerintah federal telah menyediakan tambahan dana untuk pengajaran dan pengembangan bahasa Indonesia.

Meskipun di Jerman telah diajarkan sejak lama, namun perkembangan pengguna bahasa Indonesia di Jerman tidak sepesat di Australia. Di Jerman, hingga tahun 70-an,

hanya ada empat pusat bahasa. Namun, pembuatan bahan ajar bahasa Indonesia oleh Wolff yang berjudul *Beginning Indonesia* dan Johns dengan bukunya yang berjudul *Bahasa Indonesia Langkah Baru* menjadi kelebihan di negara ini. Dengan pembuatan bahan ajar, tentu akan memudahkan para pembelajar untuk mempelajari bahasa Indonesia.

Selain negara-negara Eropa, negara Asia bahkan telah lebih dahulu menaruh perhatiannya pada bahasa Indonesia. Pada Data (12) sempat diceritakan tentang sastrawan India yang bernama Nuruddin Ar Ranniri yang telah memahami bahasa Melayu/Indonesia sejak abad ke-15. Korea sebagai salah satu Negara besar di Asia juga telah memulai mempelajari bahasa Indonesia sejak tahun 1964. Bahkan jurusan yang dibuka dengan spesifik tertulis “Jurusan Indonesia”. Hanya saja, setelah tahun 1982, karena masalah politik, dilakukan pengubahan nama jurusan menjadi “Jurusan Malay-Indonesia.”

Meskipun terjadi perubahan nama jurusan, namun ini tidak menjadi halangan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1991, melalui catatan Young-Rhim bahwa beberapa universitas besar di Korea telah menamatkan hampirseribu orang mahasiswa Jurusan Indonesia. Tabel (2) berikut akan memaparkan datanya.

Tabel 2. Tamatan Jurusan Indonesia di Universitas Korea Tahun 1991

Nama Universitas	Jumlah Tamatan
Universitas Hankuk	692
Universitas Seoul	90
Universitas Youngin	252
Jumlah	1.034

Sumber: (Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1998)

Keseriusan Korea dan dalam mempelajari bahasa Indonesia sangat kuat. Keseriusan ini ditunjukkan dengan pengiriman mahasiswa Korea untuk berkuliah di universitas yang terdapat di Indonesia. Bahkan, pendalaman kajian bukan hanya pada tataran linguistik, orang-orang Korea juga mendalami bidang kesusastraan Indonesia.

Data (15)

"Pada tahun 1985 jurusan kami mengadakan kuliah S2 dan sampai sekarang telah tamat 9 orang, dan 2 orang sedang mengikuti kuliah dalam bidang kesusastraan dan linguistik. Tamatan dari jurusan kami yang sedang belajar di Indonesia sebanyak 6 orang. Seorang di S-3 (UGM kesusastraan) dan yang lainnya mendapat gelar sarjana atau sedang di S-2 (UI-Linguistik)." (Young-Rhim, 1998)

Data (15) telah jelas memaparkan mengenai sejarah awal perkembangan bahasa Indonesia di beberapa negara asing. Tentu perkembangan ini tidak lepas dari berbagai kendala. Namun, kendala ini harus dipandang dari sisi positif. Kendala ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memajukan bahasa Indonesia. Terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tawaran BIPA di berbagai negara. Permasalahan ini menjadi beberapa faktor penghambat seperti yang dikemukakan oleh S. Sugino (1998) dalam makalahnya yang berjudul *Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing*.

Sikap dan Politik Bahasa

Kemajuan dan perkembangan sebuah bahasa tentu tidak lepas dari peran berbagai pihak. Pemerintah, Lembaga Kebahasaan, ahli bahasa, dan masyarakat pengguna bahasa merupakan beberapa pihak yang punya andil besar dalam kemajuan suatu bahasa. Pada pembahasan bagian ini, akan dipaparkan mengenai sikap dan politik bahasa. Kedua hal ini menjadi salah satu aspek yang membuat bahasa dapat berkembang. Jika pemerintah, lembaga kebahasaan, ahli bahasa, dan masyarakat pengguna bahasa dan bersinergi dengan baik dalam menyikapi dan melaksanakan politik bahasa, maka bukan hal yang mustahil kalau beberapa tahun ke depan, bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional. Lebih dari itu, bahasa merupakan alat mencapai sebuah kekuasaan. Bahasa adalah cara untuk mendominasi sebuah lingkungan. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Habermas seorang filosof besar pada kutipannya berikut.

Data (16)

"Language is also a medium of domination and power." (Heryanah, 2003)

Berdasarkan data (16) jelaslah bahwa bahasa bukan hanya masalah komunikasi semata, tapi bahasa juga mencakup masalah kekuasaan. Sehingga dapat disimpulkan, melalui bahasa maka akan terbentuk sebuah kekuasaan. Hal inilah yang coba dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Melalui pengembangan bahasa Indonesia, diharapkan pada masa yang akan datang, Indonesia menjadi sebuah negara yang mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Sikap bahasa merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap penggunaan sebuah bahasa. Dalam hal ini bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia. Sikap bahasa dirumuskan berdasarkan pemikiran Anderson dalam Chaer seperti pada kutipan berikut.

Data (17)

"Anderson membagi sikap atas dua macam, yaitu (1) sikap kebahasaan dan (2) sikap nonkebahasaan, seperti sikap politis, sikap keagamaan, dan lain-lain. Menurut Anderson, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya." (Chaer & Agustina, 2004)

Lebih lengkap, Anderson merumuskan sikap kebahasaan menjadi dua, yaitu sikap bahasa positif dan sikap bahasa negatif. Sikap bahasa positif adalah perasaan suka dan senang terhadap sebuah bahasa, sementara sikap bahasa negatif adalah kebalikan dari sikap bahasa positif. Pendapat Anderson mengenai sikap bahasa sejalan dengan Garvin dan Mathiot. Hanya saja, Garvin dan Mathiot membagi sikap bahasa menjadi tiga ciri seperti pada data berikut:

Data (18)

Ketiga ciri sikap bahasa yang dirumuskan oleh Garvin dan Mathiot telah menunjukkan bahasa Indonesia dewasa ini. Ketiga ciri sikap bahasa yang dimaksud adalah: (1) Kesetiaan Bahasa (Language Loyalty) yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain; (2) Kebanggaan Bahasa (Language Pride) yang mendorong orang dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat; (3) Kesadaran adanya norma bahasa (Awareness Of The Norm) yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap

perbuatan yaitu menggunakan kegiatan bahasa (language use)." (Chaer & Agustina, 2004)

Ketiga ciri yang dikemukakan Garvin dan Mathiot tersebut merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa. Sikap positif yaitu sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasanya (bahasa yang digunakan oleh kelompoknya/masyarakat tutur di mana dia berada). Sebaliknya jika ciri-ciri itu sudah menghilang atau melemah dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang anggota masyarakat tutur, maka berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang itu. Ketiadaan gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya merupakan salah satu penanda sikap negatif.

Ketiga ciri sikap bahasa yang terdapat pada data (18), semuanya telah dimiliki oleh penduduk Indonesia dan diterapkan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ciri pertama, kesetiaan bahasa (*Language Loyalty*). Orang Indonesia termasuk orang yang setia dalam penggunaan bahasa. Meskipun Indonesia lama dijajah oleh beberapa negara, namun orang Indonesia tidak menggunakan bahasa negara penjajah tersebut sebagai bahasa resmi kenegaraan. Itu adalah tanda kesetiaan orang Indonesia terhadap perjanjian yang dibuat ketika Sumpah Pemuda bahwa bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia.

Ciri kedua adalah kebanggaan bahasa (*Language Pride*). Meskipun dewasa ini, negara Indonesia penuh dengan berbagai kasus negatif, namun hal ini tidak berdampak pada bahasanya. Orang Indonesia bangga dengan bahasa Indonesia karena tidak semua bangsa memiliki bahasa sendiri. Ambillah contoh Amerika Serikat. Meskipun berpredikat sebagai negara besar dan maju, tetapi Amerika tidak memiliki bahasa sendiri. Itulah yang membuat orang Indonesia bangga dengan bahasa Indonesia.

Ciri ketiga adalah kesadaran adanya norma bahasa (*Awareness of The Norm*). Pembentukan Lembaga Kebahasaan oleh pemerintah membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa yang teratur. Meskipun rata-rata orang Indonesia menganut paham bilingualisme, namun dengan adanya

kesadaran norma bahasa, orang Indonesia mampu membagi dengan baik penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Data (19)

"Politik bahasa adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan bahasa." (Heryanah, 2003)

Pendirian sebuah lembaga kebahasaan merupakan jalan yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan perkembangan bahasa Indonesia yang sesuai keinginan pada Data (18). Di Indonesia, pendirian lembaga kebahasaan telah dilakukan jauh sebelum negara ASEAN lainnya mendirikan lembaganya. Pendirian lembaga kebahasaan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1908. Lembaga ini bernama *Commisie voor de Vlokslectuur* yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sembilan tahun kemudian, tepatnya 1917, *Commisie voor de Vlokslectuur* berubah nama menjadi Balai Pustaka. Sementara di negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Filipina, pendirian lembaga kebahasaannya baru dilakukan pada tahun 1950an. Berikut ini data yang ditemukan oleh Chaer dan Agustina:

Data (20)

"Di Indonesia, lembaga yang terlibat dalam perencanaan pengembangan bahasa dimulai dengan berdirinya Commisie voor de Vlokslectuur tahun 1908, yang pada tahun 1917 berubah menjadi Balai Pustaka... Di Asia lembaga yang mengurus bahasa tercatat Dewan Bahasa dan Pustaka di Malaysia, didirikan tahun 1959; di Singapura berdiri Lembaga Bahasa Melayu tahun 1950; dan di Filipina berdiri Lembaga Bahasa Nasional (Surian ng Wikang Pambansa) tahun 1936." (Chaer & Agustina, 2004)

Pembentukan lembaga kebahasaan yang di tahun 2017 bernama Pusat Bahasa ini bahkan mengalahkan negara besar di Asia seperti Jepang dan Cina. Lebih dulunya pembentukan Lembaga Kebahasaan di Indonesia menjadi tolok ukur kalau sistem perencanaan bahasa Indonesia lebih matang. Mengenai perencanaan bahasa, Rubin dan Jernuud dalam Alwasilah mengemukakan kalau yang dimaksud perencanaan bahasa adalah sebuah perubahan bahasa yang sengaja dilakukan oleh organisasi yang diberi mandat untuk memenuhi tujuan bersama.

Panjangnya proses perencanaan bahasa Indonesia yang dimulai sejak tahun 1901 merupakan sebuah alasan kalau bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa yang telah matang. Maka bukan hal yang mengada-ada kalau pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN, kini tengah diperjuangkan. Sikap dan politik bahasa yang dibangun oleh pemerintah menjadi salah satu pertimbangan. Dengan pembuatan Pusat Bahasa sebagai kebahasaan yang sebuah resmi, lembaga proses perencanaan bahasa Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa data dan faktor yang telah dipaparkan pada bagian ini, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia dari sudut pandang sikap dan politik, memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi ASEAN.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terdapat ada dua hal yang dapat disimpulkan. Pertama, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi ASEAN. Kedua, ada lima faktor yang memperkuat potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Hal pertama yang terdapat pada rumusan masalah adalah kelayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, ada tiga hal yang membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Hal pertama adalah Indonesia memiliki aturan kebahasaan yang kuat landasan hukumnya, kedua bahasa Indonesia menjadi bahasa dengan pengguna terbanyak di ASEAN, dan ketiga Indonesia memiliki politik bahasa yang menunjang pengembangan bahasanya.

Ada lima faktor yang dapat dijadikan pegangan sebagai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Kelima faktor tersebut sebagai berikut: (1) sejarah bahasa Indonesia; (2) regulasi bahasa Indonesia; (3) regulasi bahasa ASEAN; (4) Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA); serta (5) sikap dan politik bahasa.

Ada empat negara di ASEAN yang menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar

bahasa negaranya. Indonesia adalah salah satu dari empat negara tersebut. Namun, jika merujuk data sejarah pada penelitian ini, di antara keempat negara tersebut, Indonesia merupakan negara yang paling kuat nilai kemelayuannya. Data sejarah menunjukkan kalau bahasa melayu berasal dan berkembang di kawasan Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor pertama sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa resmi ASEAN.

Faktor kedua adalah regulasi bahasa. Untuk menjadi bahasa yang bertaraf internasional, diperlukan sebuah regulasi atau aturan. Pembuatan aturan kebahasaan akan menjadikan bahasa menjadi lebih teratur dari segi struktur dan fungsinya. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa dengan regulasi bahasa yang kuat. Ini tentu menjadi faktor pendukung agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN

Faktor ketiga adalah regulasi bahasa ASEAN. Sebagai sebuah organisasi besar, hingga saat ini ASEAN belum menetapkan sebuah regulasi bahasa. ASEAN masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dalam komunikasi resminya. Tentu hal ini rasanya kurang nasionalis bagi negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, regulasi yang terdapat pada bahasa Indonesia, dapat digunakan sebagai regulasi bahasa ASEAN. Tentunya, penggunaan tersebut harus disesuaikan sehingga dapat berfungsi dengan baik pada taraf komunikasi internasional.

Faktor keempat adalah Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Di antara negara ASEAN lainnya, bahasa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai bahasa dengan pengguna terbanyak. Selain itu, bahasa Indonesia sejak tahun 1950an telah diminati oleh negara-negara di dunia. Hingga saat ini, bahasa Indonesia telah dipelajari kurang lebih di 75 negara. Bahkan, di Australia, bahasa Indonesia telah masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Banyaknya pengguna bahasa Indonesia di dunia, menjadi salah satu faktor pendukung sehingga bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Faktor terakhir adalah sikap dan politik bahasa. Peran pemerintah sebagai

pemangku kebijakan tentu sangat diperlukan dalam pengembangan sebuah bahasa. Berdasarkan analisis data, hingga saat ini, memang pengguna bahasa Indonesia di ASEAN sekitar 42,5%. Jumlah yang sudah cukup banyak. Ditambah lagi, sikap dan politik bahasa yang dilakukan pemerintah dengan membuat perencanaan bahasa Indonesia menjadi sangat visioner. Berdasarkan perencanaan yang matang, tentu bahasa Indonesia akan terus berkembang dan sangat berpotensi menjadi bahasa resmi ASEAN.

Dengan demikian, Bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai bahasa internasional, terutama di wilayah Asia Tenggara. Sejarah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu yang digunakan secara luas di Asia Tenggara mendukung meningkatnya penutur bahasa. Tata bahasa yang lebih berkembang dan terstruktur dalam artikulasi dan aksen menjadikan bahasa Indonesia mudah dipelajari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Husen. 1987. *Indonesian as a Unifying Language of Wider Communication: a Historical and Sociolinguistic Perspectives*. Canberra: Research School of Pasific Studies, ANU.
- Alek dan H.Achmad H.P. 2010. *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana
- Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A. M. (2000). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anshari. (2011). *Pengembangan Kepribadian Bahasa Indonesia*. Makassar: Badan Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- Anwar, Khaidir. 1998. *Pengkajian Bahasa Indonesia di Luar Negeri*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Chaer, A. & Agustina, L. (2004). *Sociolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rinepka Cipta.
- Fishman, Joshua A. 1972. *Readings The Sociology of Languge*. Massachussetts: Newburry House.
- Fishman, Joshua A. 1974. *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Groeneboer, Kees. (1999). Politik Bahasa Pada Masa Hindia Belanda. *Jurnal Wacana*, Volume 1 (1), 32-48
- Heryanah. (2003). Politik Bahasa. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 (1), 127-132
- Hudson, R. A. (1996). *Sociolinguistic: Second Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Indihadi, Dian. 2015. *Perkembangan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Kedua*. Bandung: UPI.
- Mahayana, S. Maman. 2009. *Perkembangan Bahasa Indonesia-Melayu di Indonesia dalam Konteks Sisteman Pendidikan*. Purwekerto: Insania
- Martins, F.M. 2000. *Hubungan Antar Bahasa di Kawasan Non-Austronesia*. Yogyakarta: PSAP-UGM.
- Muslich, Masnur. 2012. *Bahasa Indonesia Pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Masnur dan Ngurah Oka, I Gusti. 2012. *Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muljana, Slamet. 1981. *Kuntala, Sriwijaya, dan Suwarnabhumi*. Jakarta: Penerbit Idayu.
- Munsiy, A. D. (2005). *Bahasa Menunjukkan Bangsa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Musgrave, S. (2014). Language Shift and Language Maintenance in Indonesia. *International Journal of the Sociology of Language*, 226, 45–65.
- Nababan, P. (1993). *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Prosiding Kongres*

- Bahasa Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia*. 2014. Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Siswanto. (2011). *Metode Penelitian Sastra: Analisis Struktur Puisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sneddon, J. N. (2003). *The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society*. Sydney: UNSW Press.
- Sugino, S. 1998. *Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*. 1945. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. 2009. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Young-Rhim, Coung. 1998. *Keadaan Pengajaran Bahasa Indonesia di Korea*. Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Zulkarnain, A. (2012). *Pare dan Catatan Tak Usai: Pergolakan Mahasiswa Spirit Kampung Bahasa Pare*. Makassar: Philosophia Press